

Implikasi Krisis Ekonomi Bagi Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional

J. Soedjati Djwandono

Meskipun krisis yang kini melanda kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur pada hakikatnya merupakan krisis ekonomi, pengaruhnya bagi seluruh kawasan ternyata juga bersifat politik dan keamanan. Dalam dunia yang semakin terbuka dan saling tergantung satu sama lain, pengaruh tersebut jelas semakin kuat. Berkaitan dengan itulah, upaya pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan regional akan tergantung pada keberhasilan masing-masing negara dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Bagi Indonesia, untuk dapat berperan dalam menciptakan dan memelihara stabilitas politik dan keamanan regional, tantangan yang harus segera diatasi adalah bagaimana memfungsikan kembali sistem politiknya agar sesuai dengan semangat reformasi serta menciptakan mekanisme kontrol yang efektif berdasarkan pendekatan bottom up. Dalam konteks ASEAN, masalah good governance dan pembentukan civil society perlu segera diwujudkan oleh seluruh negara anggotanya agar dapat meningkatkan kredibilitas dan respectability-nya di mata dunia internasional.

Pendahuluan

POKOK masalah untuk tulisan ini semula telah dirumuskan dalam Kerangka Acuan untuk Dialog V tentang Politik dan keamanan Regional dalam Era Pasca Perang Dingin dengan tema utama Dampak Krisis Ekonomi bagi Stabilitas dan Keamanan Kawasan Asia Pasifik, yaitu di bawah judul "Pengaruhnya terhadap Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara". Tetapi kawasan Asia Pasifik begitu luas dan terdiri atas beberapa subkawasan, di antaranya adalah kawasan Asia Timur, atau lebih tepat Asia Timur Laut dan Asia Tenggara.

Janganakan pembahasan tentang seluruh kawasan Asia Pasifik yang begitu beragam dalam begitu banyak seginya, bahkan membahas dua subkawasan Asia Tenggara dan Asia Timur (Timur Laut) sekaligus dapat dikatakan terlalu kompleks dan ambisius. Kendati terdapat beberapa persamaan, di antara kedua subkawasan itu terdapat pula beberapa perbedaan yang mendasar sifatnya, sehingga ciri hubungan antarnegara di kedua subkawasan itu juga sangat berbeda. Demikian pula, apa yang telah dapat diusahakan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam kerangka kerja sama regional di Asia Tenggara dalam bentuk ASEAN belum mungkin dilakukan oleh negara-negara subkawasan Asia Timur Laut untuk jangka waktu yang masih panjang (Djiwandono, 1996).

Oleh sebab itu, pendekatan subregional agaknya lebih realistis dan lebih *feasible*, dan akan mengurangi kecenderungan *oversimplification* karena kompleksnya kedua subkawasan, apalagi bila dikaitkan dengan seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan oleh sebab itu pula, kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks ASEAN, akan menjadi perhatian utama pembahasan di bawah ini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal adanya kaitan yang erat antara krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Tenggara dan yang melanda negara-negara Asia Timur. Demikian pula halnya bila dilihat dari segi politik dan keamanan. Tetapi ini akan memerlukan pembahasan tersendiri.

Hakikat Krisis

Sejak tahun 1997 lalu, krisis ekonomi, yang diawali oleh krisis moneter, telah melanda negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun bukan negara yang pertama dilanda krisis itu, pengalaman Indonesia adalah yang paling parah, lebih parah daripada Korea Selatan, Thailand, atau Malaysia. Bahkan sebelum krisis moneter, Indonesia telah mengalami krisis lingkungan hidup dalam bentuk kebakaran dan pembakaran hutan yang paling parah yang pernah terjadi selama ini, antara lain juga oleh karena musim kering yang paling lama dan paling buruk selama puluhan tahun.

Menilai hakikat krisis secara tepat, meskipun disebut terutama sebagai krisis moneter dan krisis ekonomi, perlu dilakukan agar dapat ditentukan kebijakan dan prioritas kebijakan untuk menanganinya. Telah dikatakan, misalnya, bahwa:

"Semakin parahnya kondisi perekonomian ini telah membawa instabilitas politik di Indonesia. Bermula dengan maraknya aksi-aksi mahasiswa yang menuntut konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis, sampai akhirnya menuntut turunnya Presiden Soeharto. Ketika kemudian tuntutan ini dipenuhi dan Wakil Presiden Habibie mengambil alih jabatan Presiden, permasalahan politik ternyata belum selesai. Kerusuhan yang terjadi di beberapa kota, yang umumnya menimpa WNI keturunan mengakibatkan terjadinya eksodus golongan masyarakat ini ke luar negeri. Investasi asing yang diharapkan akan dapat membantu memulihkan ekonomi Indonesia, banyak yang ditarik kembali atau dibatalkan".¹

Penilaian semacam itu tentang krisis di Indonesia jelas sangat meleset. *Pertama*, karena penilaian itu memberi kesan seakan-akan krisis ekonomi telah menimbulkan instabilitas politik yang dicerminkan oleh maraknya gerakan reformasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya, yang umumnya menimpa WNI keturunan Tionghoa sehingga banyak di antaranya lari ke luar negeri. Peristiwa kerusuhan harus dipisahkan dari gerakan mahasiswa, karena ada petunjuk-petunjuk kuat bahwa serangkaian kerusuhan itu justru disulut secara berencana dan terorganisir oleh kekuatan-kekuatan yang menentang reformasi untuk mencemarkan dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi total.

Kedua, krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia menjadi begitu parah, melebihi negara-negara lain di Asia Tenggara maupun

¹Lihat Kerangka Acuan (TOR) Forum Dialog V tentang Politik dan Keamanan Regional dalam Era Pasca Perang Dingin dengan tema Dampak Krisis Ekonomi bagi Stabilitas dan Keamanan Kawasan Asia Pasifik, hlm. 2.

Asia Timur, terutama karena sistem politik di Indonesia sudah beku dan tidak berfungsi secara wajar. Hal ini adalah karena terjadinya manipulasi oleh mereka yang berkuasa, terutama oleh Orde Baru. Kehidupan perekonomian yang ditandai oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah memungkinkan dominasi monopoli dan oligopoli, perbankan yang tidak sehat tetapi dibiarkan terus beroperasi, utang luar negeri yang begitu tinggi baik oleh pemerintah maupun swasta, ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) -- semua itu adalah akibat tidak berfungsinya sistem politik, atau lebih khusus lagi tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif. Semakin menumpuk dan terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden Soeharto telah menjadikan sistem politik di Indonesia praktis menjadi suatu *one man rule* dengan seluruh kelembagaan negara, baik cabang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bahkan ABRI, akhirnya berkembang menjadi sekadar alat kekuasaan eksekutif, khususnya Presiden.

Di Thailand, krisis ekonomi telah berakibat bergantinya pemerintahan, karena sistem politiknya berfungsi. Di Korea Selatan, kebetulan baru saja terpilih seorang presiden baru melalui pemilihan yang jauh lebih bebas dan jujur daripada di Indonesia, sehingga terpilihlah seorang calon dari pihak oposisi yang sudah lama berjuang dan keluar-masuk tahanan. Sistem politik yang lebih sehat di kedua negara tersebut memungkinkan hal itu terjadi.

Sebaliknya, di Indonesia bahkan *sense of crisis* dan *sense of urgency* tidak terlihat pada pemerintahan Soeharto. Kesepakatan dengan IMF dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dan telah beberapa kali direvisi ternyata tidak dipenuhi. Meskipun de-

mikian, dengan segala macam rekayasa, termasuk rekayasa pemilu, orpol-orpol, dan dengan demikian juga pembentukan DPR dan MPR, Soeharto bahkan dipilih kembali untuk ketujuh kalinya berturut-turut secara "aklamasi" sebagai calon tunggal. Begitu pula halnya dengan Wakil Presiden Habibie.

Pada pemerintahan Habibie yang sekarang menggantikannya ternyata juga tidak terlihat adanya *sense of crisis* dan *sense of urgency*. Namun, hal ini tidaklah mengherankan bila mengingat bahwa pemerintahan Habibie tidak lebih dari suatu perpanjangan dari Orde Baru Soeharto, karena pengangkatan Habibie sebagai Wakil Presiden sebelumnya juga telah merupakan hasil rekayasa Orde Baru oleh MPR yang pada gilirannya juga merupakan hasil rekayasa Orde Baru (Djiwandono, 1998a). Inilah yang menjadi sebab mengapa "permasalahan politik ternyata belum selesai". Dan selama krisis politik tidak teratasi, sulit diramalkan bagaimana krisis ekonomi dapat diatasi. Reformasi dalam bidang ekonomi menuntut reformasi politik.

Memang, mungkin banyak orang tidak menyadari sebelumnya bahwa sistem politik Indonesia sudah tidak berfungsi dengan baik. Rakyat sudah dibodohi selama tiga dasawarsa era Orde Baru. Walaupun menyadari, tidak banyak orang yang berani menyatakan pendapat dan mengungkapkan kritik-kritiknya tanpa menghadapi risiko dituduh makar, anti-Pancasila dan UUD 1945, kena pengaruh komunis, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, menghina Kepala Negara, dan sebagainya.

Tetapi krisis ekonomi tidak saja telah menyadarkan masyarakat, melainkan juga

telah membangkitkan keberanian untuk menuntut perbaikan hidup dan untuk itu menuntut reformasi total dan menyeluruh atas sistem kehidupan politik Orde Baru. Oleh sebab itu persoalan tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan turunnya Presiden Soeharto dan diganti oleh Presiden Habibie. Seluruh sistem pemerintahan, lembaga-lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga negara lainnya, sistem kepartaian, serta sistem pemilu juga harus direformasi dan dirombak total.

Implikasi Politik dan Keamanan Regional

Krisis yang melanda salah satu atau beberapa negara sekaligus, cenderung mempunyai pengaruh atau implikasi terhadap stabilitas politik, ekonomi, maupun keamanan negara-negara lain baik secara individu maupun dalam arti bilateral dan multilateral dalam konteks hubungan antarnegara itu. Dalam dunia yang semakin terbuka dan semakin interdependen atau saling tergantung satu sama lain karena kemajuan teknologi komunikasi, apalagi karena kedekatan geografis dalam suatu kawasan, kecenderungan itu akan semakin kuat. Pengaruh atau implikasi itu dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif.

Pengaruh krisis dapat bersifat positif dalam hubungan politik dan keamanan jika krisis itu mendorong hubungan dan kerja sama yang lebih erat untuk saling membantu mengatasi krisis itu, baik antara negara-negara yang masing-masing mengalami krisis ataupun antara yang mengalami krisis dan yang tidak mengalami krisis. Sudah barang tentu saling membantu itu didorong oleh kepentingan masing-masing, sekurang-

kurangnya dalam jangka panjang, bahkan pada pihak negara-negara yang tidak mengalami krisis, atau sekurang-kurangnya tidak mengalami krisis yang sama parahnya. Dalam pengertian itu bantuan mengandung unsur saling menguntungkan.

Jelas, bantuan atau kerja sama antarnegara itu tidak didorong oleh kebaikan atau kemurahan hati. Oleh sebab itu, mengecam negara tetangga sebagai "bukan sahabat sejati" karena bantuannya dinilai terlalu kecil atau terlalu lambat hanya menunjukkan kurang pemahaman tentang sifat hubungan antarnegara. Meskipun sedikit, Singapura sudah menawarkan dan memberikan bantuan kepada Indonesia dalam mengatasi krisis pangan dan obat-obatan. Vietnam juga memberikan bantuan pangan.

Selama masa krisis ini beberapa waktu yang lalu, misalnya, juga telah terjadi kesepakatan antarnegara ASEAN untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam hubungan perdagangannya. Bagaimana hal itu dilakukan dan sampai berapa jauh, serta apakah hal itu menguntungkan dan membantu mengatasi krisis moneter dan ekonomi masing-masing, selama ini belum kita dengar perkembangannya.

Di balik bantuan atau kerja sama dalam menanggulangi krisis adalah kepentingan agar krisis di satu negara tidak mempunyai pengaruh, dampak atau akibat negatif yang merugikan, yang mungkin akan mengancam stabilitas atau keamanan nasional sendiri, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. "Stabilitas" dan "keamanan" di sini harus dipahami dalam pengertiannya yang luas atau komprehensif.

Kekhawatiran akan pengaruh negatif yang mengancam stabilitas negara tetang-

ga akibat adanya krisis sangat mudah dimengerti. Sekarang saja sudah banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang lari ke Singapura dan Malaysia akibat serangkaian kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain. Belum dapat dinilai, apakah hal itu menguntungkan Singapura dan Malaysia sendiri secara ekonomis, misalnya karena keberadaan mereka di sana umumnya masih bersifat konsumtif. Dalam jangka panjang hal itu tampaknya dapat merugikan, kalau keberadaannya mereka lebih lama lagi dan mereka mulai mencari kesempatan kerja. Jangankan dalam masa krisis, selama ini banyak orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sebelum krisis, hal ini sudah sedikit mengganggu hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam masa krisis ekonomi sekarang ini, dapat diduga bahwa masalah itu akan menjadi lebih serius.

Sebenarnya, bahkan sebelum krisis melanda kawasan ini, di Indonesia sudah terjadi krisis lingkungan seperti sudah disinggung di atas. Asap yang terbawa angin meluas ke negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia, telah mengganggu penerbangan dan sedikit mengganggu kesehatan penduduk Kuala Lumpur. Kerugian dalam arti ekonomi atas kejadian itu tentu dapat diperhitungkan.

Bentuk ancaman baik dalam arti ekonomi, politik maupun keamanan masih mungkin terjadi selama krisis ekonomi, terutama di Indonesia, semakin memburuk. Kemungkinan ini sangat nyata. Bukan mustahil bahwa kedua negara tetangga itu akan khawatir dengan kemungkinan mengalirnya *boat people* dari Indonesia dalam upaya bukan

saja untuk mencari tempat berlindung, tetapi lebih penting lagi untuk mencari hidup sebagaimana telah terjadi di masa lampau dengan para pengungsi dari Vietnam dengan segala konsekuensinya bukan saja bagi negara-negara kawasan ini, tetapi juga negara-negara lain di Eropa dan Amerika yang menyediakan tempat-tempat penampungan.

Meskipun krisis moneter dan ekonomi yang melanda negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur berawal dari menurunnya nilai mata uang negara-negara itu terhadap dolar Amerika Serikat, dan untuk sementara kelihatan menguntungkan AS dengan ekonominya yang *booming*, sesungguhnya dalam jangka panjang hal itu dapat merupakan *backlash* bagi AS karena ekspor AS akan menjadi sangat mahal. Tetapi masalah itu berada di luar ruang lingkup bahasan dalam tulisan ini sehingga tidak akan diuraikan lebih lanjut.

Upaya Stabilitas Politik dan Keamanan: Dimensi Nasional

Asumsi dasar yang melandasi pembentukan ASEAN lebih dari tiga puluh tahun yang lampau yang menolak campur tangan pihak luar pada hakikatnya adalah bahwa negara-negara Asia Tenggara hendak menata rumah tangganya masing-masing (*to put their own houses in order*). Ini dapat disimpulkan dari Deklarasi Bangkok. Oleh sebab itu, upaya pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan regional akan tergantung pada keberhasilan masing-masing negara dalam mengurus rumah tangganya masing-masing dan mengusahakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan dalam negeri masing-masing.

Sepanjang hal itu menyangkut Indonesia, seperti sudah dibahas sebelumnya, krisis moneter dan ekonomi yang semakin parah, bahkan krisis lingkungan sebelumnya yang berlarut-larut, disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem politik. Dengan demikian, pemecahan krisis ekonomi di Indonesia menuntut reformasi politik. Tetapi keadaannya sekarang nampaknya terbalik. Akibat lambat atau bahkan *mandeg*-nya proses reformasi politik, seluruh kehidupan politik negeri ini akan *collapse* karena situasi ekonomi, terutama krisis kekurangan pangan akan semakin parah. Kebijakan pemerintahan Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi lebih bersifat *populist*,² yang nampaknya ditujukan untuk mencari popularitas, dan bukan kredibilitas. Dengan kata lain, kebijakan itu lebih ditujukan untuk memperkuat kekuasaannya atau legitimasi kekuasaannya, daripada untuk menghidupkan perekonomian secara mendasar. Kebijakan seperti itu lebih bersifat politis, tetapi tidak mendasar, dan bukan merupakan bagian dari proses reformasi.

Pada dasarnya keputusan untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR dan mencaangkan Pemilu lebih awal dari rencana semula sudah merupakan langkah tepat untuk mengatasi krisis politik dan dengan demikian juga krisis ekonomi di Indonesia. Tetapi apakah hasil SI MPR dan Pemilu akan benar-benar menghasilkan reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat, tergantung pada persiapannya. MPR yang terutama beranggotakan wakil-wakil dari ketiga orpol harus direformasi lebih dulu. Tetapi ketiga

orpol tidak kelihatan melakukannya, termasuk Golkar yang merupakan orpol paling besar (Djiwandono, 1998b). Perundang-undangan yang relevan harus dirombak sesuai dengan tuntutan reformasi. Tetapi ini pun belum kelihatan. Patut dikhawatirkan, bahwa SI MPR hanya akan melestarikan pemerintahan Habibie, dan dengan demikian melestarikan sistem Orde Baru Soeharto.

Sementara itu, telah timbul begitu banyak partai politik baru, yang mencerminkan semangat rakyat untuk menikmati kebebasan yang lahir dari gerakan reformasi. Partai-partai ini hendak menyuarakan aspirasi rakyat yang hingga kini tidak tertampung dan tersalurkan melalui sistem yang ada. Tetapi seberapa jauh partai-partai baru ini akan mempunyai pengaruh atas jalannya SI MPR dan Pemilu untuk meneruskan gerakan reformasi ke arah kehidupan politik yang lebih sehat, dan dengan demikian mengatasi krisis politik dan ekonomi sehingga dapat membangun masyarakat baru yang lebih sejahtera dan lebih adil, masih harus kita lihat perkembangannya. Tetapi jelas, reformasi pada hakikatnya menuntut dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat, yang selama lebih dari tiga puluh tahun telah dirampas oleh kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan semakin mutlak, serta semakin tidak menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia serta tidak mengabdikan kebenaran dan keadilan.

Sidang Istimewa MPR dan Pemilu harus dapat menciptakan mekanisme kontrol yang efektif. Kontrol itu adalah kontrol atas penggunaan kekuasaan, jadi kontrol dari bawah, oleh rakyat dan melalui wakil-wakilnya, bukan kontrol dari atas seperti dalam sistem Orde Baru. Tetapi sebagian dari apa

²Lihat komentar Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip dalam *Jakarta Post*, 7 July 1998.

yang telah dilakukan oleh pemerintahan Habibie yang seharusnya mempersiapkan SI MPR, mulai dengan peraturan (Perpu No. 2/1998) yang melakukan kontrol atas hak berbicara dan menyatakan pendapat merupakan kontrol dari atas.

Masalah utama yang kini dihadapi oleh pemerintahan Habibie adalah bagaimana memulihkan kepercayaan di dalam maupun di luar negeri. Turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh pemerintahan Habibie belum memulihkan kepercayaan itu. Ini terlihat dari pasar bebas yang tidak dapat dibohongi. Nilai rupiah tetap terpuruk terhadap dolar AS. Bantuan luar negeri, khususnya melalui IMF, lamban dan terkesan enggan dan pelit. Investasi asing belum juga mengalir.

Untuk memulihkan kepercayaan itu dituntut tindakan politik yang drastis ke arah reformasi. Pemerintah dituntut pula untuk mampu menciptakan keamanan di dalam negeri. Kenyataan bahwa telah terjadi berbagai kerusuhan di berbagai tempat yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda, dan banyaknya warga keturunan Tionghoa yang lari ke luar negeri karena ketakutan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memberi perlindungan keamanan bagi warga negaranya sendiri. Oleh sebab itu, meskipun merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, dan terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak akan berada dalam posisi untuk memainkan peran yang berarti dalam menciptakan dan memelihara stabilitas politik dan keamanan regional, apalagi internasional. Indonesia tidak akan mampu dan tidak memiliki kredibilitas yang diperlukan.

Upaya Stabilisasi Politik dan Keamanan: Dimensi Regional

Dari uraian singkat di atas menjadi jelas, bahwa krisis moneter dan ekonomi telah menunjukkan betapa negara-negara Asia Tenggara semakin terbuka satu sama lain, semakin peka terhadap apa yang terjadi di masing-masing negara. Meskipun krisis yang melanda negara-negara di kawasan ini pada dasarnya adalah krisis ekonomi, implikasi bagi seluruh kawasan ini juga bersifat politik dan keamanan dalam arti luas atau komprehensif.

Tetapi menarik, walaupun dalam arti aneh, bahwa justru karena itu prinsip tidak campur tangan (*non-intervention*) terhadap masalah-masalah dalam negeri masing-masing telah dipegang erat sebagai suatu *cardinal principle* atau suatu *article of faith* di antara negara-negara ASEAN. Meskipun demikian, ketika terjadi krisis politik yang memuncak di Kamboja beberapa waktu silam, dan meskipun negara itu belum lagi menjadi anggota ASEAN sampai sekarang, negara-negara ASEAN sibuk mengembangkan dan membahas kemungkinan dilaksanakannya *constructive engagement* atau *constructive involvement*. Bahkan Anwar Ibrahim dari Malaysia menyarankan dilakukannya *constructive intervention* (Djiwandono, 1997b).

Kini pada saat beberapa negara ASEAN mengalami krisis ekonomi, dan di Indonesia bahkan krisis politik, negara-negara ASEAN justru kembali menekankan perlunya kebijakan *non-intervention*. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan, lebih-lebih pada pihak negara-negara anggota termasuk Indonesia, yang menolak gagasan Thailand (yang didukung Filipina) tentang *flexible*

engagement pada pertemuan menlu-menlu ASEAN (AMN) tahun 1998 di Manila. Akhirnya disepakati rumusan kompromi *enhanced interaction* (Kompas, 26 Juli 1998).

Sebenarnya, dalam konteks *comprehensive security*, dan mengingat bahwa permasalahan yang ada bukan saja merupakan persoalan ekonomi tetapi juga sosial-politik -- khususnya yang menyangkut masalah *good governance* dan pembentukan suatu *civil society* yang ditandai oleh pluralisme demokrasi, persamaan dan keadilan bagi semua orang, serta penghormatan kepada hak-hak asasi manusia -- yang sering berkaitan dengan masalah stabilitas atau instabilitas dalam negeri, merupakan masalah bersama di antara negara-negara Asia Tenggara. Perhatian atas masalah-masalah bersama itu dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan bersama atau sekurang-kurangnya terkoordinasikan dan menjadi bagian dari kerja sama dalam bidang keamanan, baik atas dasar bilateral ataupun multilateral. Sekurang-kurangnya dapat dibina tukar-menukar informasi, pengalaman dan pikiran dalam masalah-masalah seperti itu.

Baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, khususnya dalam masa krisis sekarang ini, ASEAN perlu memperkuat sta-

bililitas politik dan keamanan regional serta meningkatkan kredibilitas dan *respectability*-nya di mata dunia internasional. Ini dapat dilakukan dengan menunjukkan *good faith* dan komitmennya pada nilai-nilai universal demi kepentingan kemanusiaan dan dengan mentaati *certain standards and norms of behavior* yang semakin diterima secara universal (Djiwandono, 1997a).

KEPUSTAKAAN

- Djiwandono, J. Soedjati. 1996. "The Applicability of Southeast Asian Approaches to Security Co-operation in the Context of North-east Asia", makalah yang disajikan pada Seminar Track II tentang Asia Timur Laut, Vancouver, Canada, 1 Februari.
- Djiwandono, J. Soedjati. 1998a. "New Order Still Alive and Kicking", *Jakarta Post*, 9 July.
- Djiwandono, J. Soedjati. 1998b. "Changes in Golkar's makeup are only skin-deep", *Jakarta Post*, 15 July.
- Djiwandono, J. Soedjati. 1997a. "Should ASEAN accept Myanmar this year?", *Jakarta Post*, 19 May.
- Djiwandono, J. Soedjati. 1997b. "Constructive Engagement in Southeast Asia", makalah yang disajikan pada seminar tentang masalah itu di Bangkok, Agustus.